



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Tahun Anggaran 2019



VISI:

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI,
DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM
SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN DAN
SEJAHTERA "

MISI:

" MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN "

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ikhtisar Eksekutif
4. LKIP Kec. Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2019 (Bab I s/d Bab IV)
5. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2019
8. Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami Panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*).

Laporan Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada Sumber Daya Keuangan, Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance (GGG)*, memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas Pelayanan Umum, semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan Sistem Akuntabilitas Negara Modern yang Handal, Demokratis, Profesional, Efisiensi, Efektif, Berkualitas, Bersih, Terbuka, Partisipatif dan tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *Good Government Governance (GGG)* maka Kecamatan Mentaya Hilir Utara sesuai dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019.

Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi refrensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bagendang, Januari 2020
Camat Mentaya Hilir Utara

Drs.SAMSURIJAL,M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum Kecamatan Mentaya Hilir Utara	4
E. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Perencanaan Strategis Kecamatan	5
F. Isu Strategis	15
G. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Indikator Kinerja Utama	18
B. Rencana Kinerja Tahunan 2019	19
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	26
C. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019.....	19
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	20
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	22
Tabel 3.1	Kategori Pencapaian Kinerja	24
Tabel 3.2	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	25
Tabel 3.3	Pencapaian Target Sasaran Tahun 2019	25
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021	26
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	27
Tabel 3.6	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019	29
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 ...	31
Tabel 3.8	Data Usulan Musrenbang Desa yang Tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	32
Tabel 3.9	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Usulan yang Tertampung Dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	33
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2018 dan Tahun 2019	33
Tabel 3.11	Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dan Tahun 2019	34
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Persentase Desa yang tertib Administrasi Tahun 2019	37
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	38
Tabel 3.14	Data PKK Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	39
Tabel 3.15	Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator PKK Desa Aktif Tahun 2019	41
Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Sasaran 2 “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” Tahun 2019 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra	41
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dan Tahun 2019	42
Tabel 3.18	Data Jumlah Pelanggaran/ Laporan Kejadian yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	42
Tabel 3.19	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Trantibmas yang Ditangani Tahun 2019	44
Tabel 3.20	Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	45
Tabel 3.21	Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Petugas Linmas Kecamatan/Desa Tahun 2019	46
Tabel 3.22	Data Nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	47
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	48
Tabel 3.24	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan	49

	Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	
Tabel 3.25	Perbandingan Realisai Kinerja Sejak Tahun Tahnu 2018 sampai dengan Tahun 2019	50
Tabel 3.26	Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	51
Tabel 3.27	Sasaran, Indikator Sasaran dan Realisai Keuangan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019	59

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pada tahun 2018 ini, Kecamatan Mentaya Hilir Utara telah melaksanakan 17 (Tujuh belas) program dengan didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 4 (empat) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dari 9 (sembilan) indikator pendukung adalah sebesar 99,04 % dengan kategori “Berhasil”. Adapun mengenai beberapa sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%
		Presentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang	100 %	100 %	100%
2.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Prsentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100 %	100 %	100%
		Presentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	85 %	85 %	100 %
		Presentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	80 %	71,42 %	89,27 %
		Jumlah PKK desa/kelurahan yang aktif	7 Desa	6 Desa	85,71 %
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan	Presentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	85 %	77 %	90,58 %
		Jumlah petugas linmas di kecamatan, desa/kelurahan	50 orang	45 orang	90 %
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	56	62,80	112,14 %
	CAPAIAN SASARAN				99,04 %

Secara keseluruhan Kecamatan Mentaya Hilir Utara telah menganggarkan pembiayaan seluruh belanja nya (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar **Rp. 4.122.958.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 3.784.191.928,00** atau capaian kinerja keuangan **91,78 %**. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama 4 (empat) sasaran strategis adalah **Rp. 2.318.290.350** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp.2.234.991.261** atau **96,41 %**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2019 ini, semoga dengan LKIP ini menjadikan Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Tuntutan tersebut bertujuan agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh. Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa karakteristik yaitu (1) Partisipasi; (2) Taat Hukum; (3) Transparansi; (4) Responsibilitas; (5) Berorientasi pada Musyawarah Mufakat; (6) Keadilan; (7) Efektif dan Efisien; (8) Akuntabilitas; (9) Visi Strategis. Salah satu dari karakteristik tersebut terdapat Akuntabilitas yang dianggap paling menentukan karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah yang berada di pusat dan daerah diharuskan melaporkan setiap hasil capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk laporan. Berdasarkan hal itu maka dikeluarkan sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP berlaku untuk semua instansi yang ada di pusat maupun daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan SOPD tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagai bagian dari instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang terdiri dari berbagai komponen. Laporan kinerja dibuat dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada tahun 2018, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan sebagai alat bantu memperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolak ukur.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 01 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2006-2010.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Laporan ini adalah memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagai bahan masukan langkah kedepan. Lebih lanjut memenuhi kewajiban sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam hal Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Sedangkan tujuan dari Laporan ini adalah menyampaikan tentang upaya kerja yang telah dilakukan dan kinerja untuk mewujudkan serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu juga menggambarkan secara singkat dan jelas keadaan dan potensi wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada tahun 2019, dan hasil yang telah dicapai dari kegiatan Camat Mentaya Hilir Utara sebagai pimpinan/penanggung jawab Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan melaksanakan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang tekah dan seharusnya dicapai oleh SOPD
2. Mendorong SOPD Kecamatan Mentaya Hilir Utara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap SOPD Kecamatan Mentaya Hilir Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA

Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah wilayah kerja Camat Mentaya Hilir Utara sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan Mentaya Hilir Utara merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah ± 96587,26 Ha dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2019 sebanyak 16.147 jiwa / 4.616 KK. Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara secara administrasi pemerintahan yang terdiri atas 7 (tujuh) Desa dengan jumlah instansi Pemerintah/UPTD sebanyak 4 (empat) buah (UPTD Dikpora, Kesehatan, BBI dan BPP) dan instansi vertikal sebanyak 3 (tiga) buah (Koramil, Polsek dan KUA).

Laporan Kependudukan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Per 31 Desember Tahun 2019

LAPORAN KEPENDUDUKAN

KECAMATAN
KABUPATEN
BULAN

: MENTAYA HILIR UTARA.
: KOTAWARINGIN TIMUR.
: Desember 2019

NO.	NAMA DESA	LUAS (Ha)	PENDUDUK BULAN LALU NOVEMBER 2019				LAHIR BULAN INI			MATI BULAN INI			DATANG BULAN INI				PINDAH BULAN INI				PENDUDUK AKHIR BULAN INI			
			KK	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	KK	L	P	L + P	KK	L	P	L + P	KK	L	P	L + P
1	PONDOK DAMAR.	9.453,38	692	1.255	1.107	2.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	6	18	687	1.243	1.101	2.344	
2	BAGENDANG HILIR.	6.469,19	611	1.106	1.056	2.162	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	1	3	4	611	1.106	1.056	2.162
3	BAGENDANG TENGAH	30.997,18	719	1.306	1.255	2.561	-	-	-	-	-	-	6	19	13	32	-	-	1	1	725	1.325	1.267	2.592
4	NATAI BARU.	4.157,87	663	1.182	1.128	2.310	-	-	-	-	-	-	4	8	9	17	1	2	1	3	666	1.188	1.136	2.324
5	BAGENDANG HULU.	4.867,29	778	1.555	1.364	2.919	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	8	12	776	1.551	1.357	2.908
6	SUMBER MAKMUR.	696,37	469	782	755	1.537	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	469	783	754	1.537
7	BAGENDANG PERMAI	2.504,98	683	1.196	1.089	2.285	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	682	1.195	1.085	2.280
JUMLAH		59.146,26	4.615	8.382	7.754	16.136	-	-	-	-	-	-	11	29	27	56	10	20	25	45	4.616	8.391	7.756	16.147

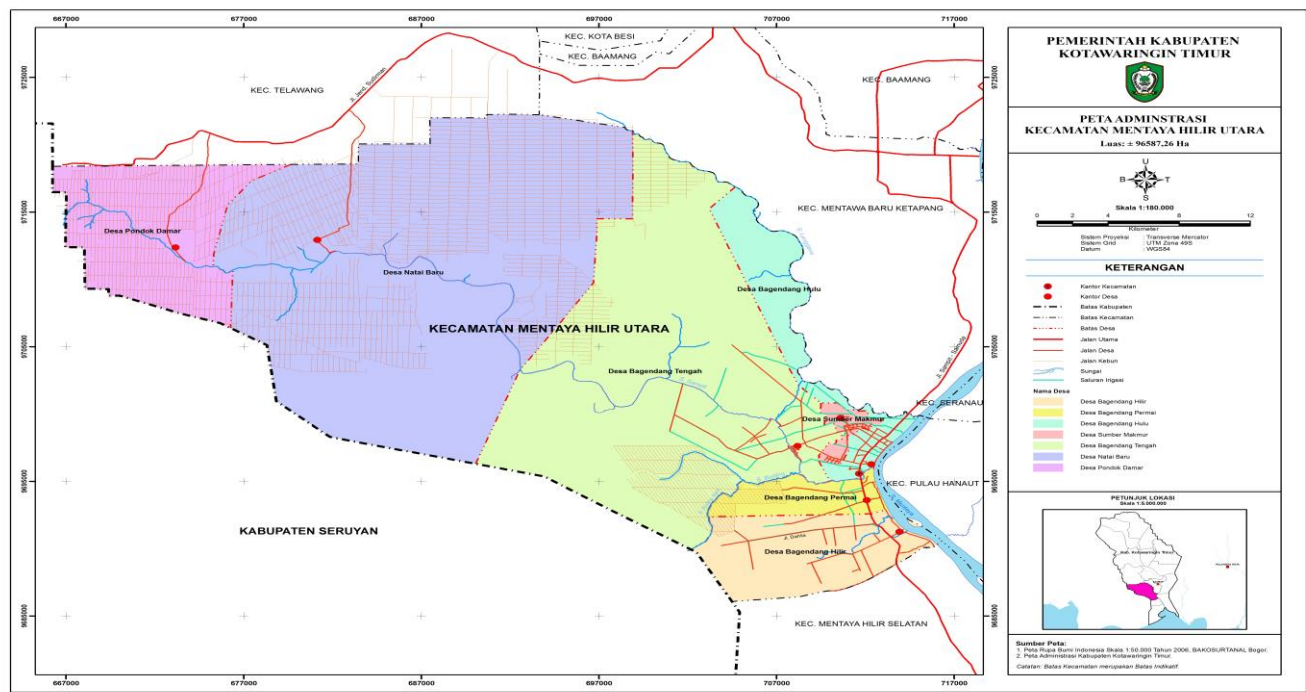
Keterangan Perubahan Data :

Perubahan jumlah Penduduk banyak dipengaruhi oleh Perusahaan / Perkebunan Kelapa Sawit (Karena keluar- masuk Karyawan / Buruh Perkebunan), Khususnya di- Desa Netai Baru dan Desa Pondok Damar, Secara umum dikel. Mentaya Hilir Utara Perubahan jumlah Penduduk karena baru didata ulang oleh masing-masing Petugas dari Desa yang bersangkutan.

Bagendang, 31 Desember 2019
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA

Dr. SAMSURJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Peta Administrasi Kecamatan Kecamatan Mentaya Hilir Utara



Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mentaya Hilir Utara meliputi :

1. Desa Bagendang Hulu dengan Luas ± 4867,29 Ha
2. Desa Bagendang Hilir dengan Luas ± 6496,19 Ha
3. Desa Bagendang Permai dengan Luas ± 2504,98 Ha
4. Desa Bagendang Tengah dengan Luas ± 30997,18 Ha
5. Desa Sumber Makmur dengan Luas ± 696,37 Ha
6. Desa Natai Baru dengan Luas ± 41571,87 Ha
7. Desa Pondok Damar dengan Luas ± 9453,38 Ha

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERENCANAAN STRATEGIS KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA

Urusan Pemerintahan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah.

Adapun tugas umum Pemerintahan yang dilaksanakan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati;
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan pembinaan kepada pemerintahan desa/kelurahan;
6. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan maupun kesehatan di wilayah kecamatan;
8. Memberikan pelayanan administrasi semua perizinan yang dilimpahkan;
9. Memberikan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat;
10. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, UPTD, atau unit kerja yang ada di wilayah kecamatan;
12. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat di wilayah kecamatan;
13. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah kecamatan; dan
14. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Mentaya Hilir Utara mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan, dimana struktur organisasi Kecamatan Mentaya Hilir Utara terdiri dari :

- a. Camat

- b. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g. Seksi Administrasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

E.1 Keadaan Pegawai

Adapun rincian Sumber Daya Manusia Pegawai di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur adalah berdasarkan tingkat penjejangan,eselon,golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- (1) Menurut Jabatan Struktural :

Esselon II.b	:	- Orang
Esselon III.a	:	1 Orang
Esselon III.b	:	- Orang
Esselon IV	:	5 Orang

- (2) Menurut Golongan :

Golongan IV	:	1 Orang
Golongan III	:	8 Orang
Golongan II	:	6 Orang
Golongan I	:	1 Orang

- (3) Menurut Pendidikan :

S-2	:	1 Orang
S-1	:	5 Orang
Diploma	:	2 Orang
SMA/ sederajat	:	7 Orang
SD	:	1 Orang

Distribusi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) di Kecamatan Mentaya Hilir Utara tahun 2019 adalah sebagai berikut Eselon III jumlah 1 orang dengan ABK seharusnya 2 ,Eselon IV berjumlah 5 orang dengan ABK sebesar 7 orang, dan staf berjumlah 10 ABK seharusnya 22 dan kekurangan tersebut sebagian diisi oleh Tenaga Kontrak .Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel

N O	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGA N
1	2	3	4	5
1	- CAMAT	1	1	-
	- Kasi Tata Pemerintahan	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	-	1	(1)
	- Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	1	-
	- Analis Pemerintah Daerah	-	1	(1)
	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	-
	- Pengadministrasi Umum	1	1	-
	- Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1	1	-
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	-
	- Pengadministrasi Umum	-	1	(1)
	- Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-
	- Kasi Pembangunan	1	1	-
	- Pengadministrasi Umum	-	1	(1)
	- Analisis Pembangunan	-	1	(1)
	- Kasi Administrasi	1	1	-
	- Pengadministrasi Umum	-	1	(1)
	- Analisi Data dan Informasi	-	1	(1)
2	- SEKRETARIS KECAMATAN	-	1	(1)
	- Kasubbag Umum dan Pelaporan	-	1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	-	1	(1)

	- Pramu Kebersihan	1	2	(1)
	- Pengelola Kepegawaian	1	1	-
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	-
	- Petugas Keamanan	-	1	(1)
	- Pengemudi	-	1	(1)
	- Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	1	1	-
	- Bendahara Pengeluaran	1	1	-
	- Verifikator Keuangan	1	1	-
	- Pengadministrasi Umum	-	1	(1)
	- Penata Laporan Keuangan	1	1	-
	TOTAL	16	31	(15)

E.2 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada SOPD Kecamatan Mentaya Hilir Utara tahun 2019,dibutuhkan sarana dan prasarana agar dapat berjalan lancer.Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sesuai data asset tetap tahun 2019 total Rp. 9.427.287.812,- sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019

NOMOR	NAMA/JENIS BARANG	KONDISI	JUMLAH
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		Rp 349.688.400
2.	Tanah untuk Bangunan Mesjid		Rp 82.800.000
3.	Pick Up	Baik	Rp 378.700.000
4.	Mobil Pemadam Kebakaran	Baik	Rp 90.000.000
5.	Sepeda Motor	Baik	Rp 204.565.600
6.	Scooter	Baik	Rp. 16.171.000
7.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	Baik	Rp. 129.413.148
8.	GPS	Baik	Rp 11.462.000
9.	Chain Saw	Baik	Rp 3.465.000
10.	Lemari Besi	Baik	Rp 3.630.000
11.	rak kayu	Baik	Rp 4.419.000

12.	filling besi/metal	Baik	Rp	7.183.000
13.	brand kas	Baik	Rp	4.455.000
14.	lemari kaca	Baik	Rp.	13.393.363
15.	lemari makan	Baik	Rp	3.850.000
16.	lemari kayu	Baik	Rp	19.360.000
17.	white Board	Baik	Rp	1.100.000
18.	Mesin absensi	Baik	Rp	2.200.000
19.	Genset	Baik	Rp	8.992.000
20.	Mesin Pompa Air	Baik	Rp	990.000
21.	Papan Nama Ruangan/Jabatan	Baik	Rp	6.820.000
22.	Kursi besi/metal	Baik	Rp	3.338.100
23.	Meja rapat	Baik	Rp	9.900.000
24.	Meja Makan	Baik	Rp	2.777.000
25.	Tenda	Baik	Rp	24.337.000
26.	Sofa	Baik	Rp.	40.104.400
27.	Lemari Pakaian	Baik	Rp	5.885.000
28.	Lemari Rias	Baik	Rp	6.985.000
29.	Tempat Tidur Busa (Springbed)	Baik	Rp	2.970.000
30.	Kursi Kerja	Baik	Rp	5.395.000
31.	Gordyn	Baik	Rp	79.182.000
32.	Rak TV	Baik	Rp	2.970.000
33.	Jam elektronik	Baik	Rp	-
34.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Baik	Rp	2.900.000
35.	Mesin Potong Rumput	Baik	Rp	3.987.000
36.	Mesin Cuci	Baik	Rp	2.950.000
37.	Lemari Es	Baik	Rp	6.147.000
38.	AC Unit	Baik	Rp.	45.016.600
39.	Kipas Angin	Baik	Rp.	4.277.750
40.	Kompor Gas	Baik	Rp	2.475.000
41.	Dispenser	Baik	Rp	7.332.000
42.	Televisi	Baik	Rp.	10.746.000
43.	Sound System	Baik	Rp.	49.895.000
44.	Alat Hiasan	Baik	Rp	4.950.000
45.	Dispenser	Baik	Rp	1.953.637
46.	Alat Rumah Tangga Lain	Baik	Rp	20.900.000
47.	Tandon Air	Baik	Rp	9.947.000
48.	Alat Pemadam portable	Baik	Rp	16.293.200
49.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran		Rp	-
50.	Tangga	Baik	Rp	3.300.000
51.	P.C Unit/Komputer PC	Baik	Rp.	13.200.000
52.	Laptop	Baik	Rp.	168.246.500
53.	Note Book	Baik	Rp	13.475.000
54.	Printer	Baik	Rp.	9.030.000
55.	Printer	Baik	Rp.	24.595.500
56.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	Rp	11.511.500
57.	Meja Kerja	Baik	Rp	17.374.000
58.	Lemari ArsipUntuk Arsip Dinamis	Baik	Rp.	29.724.500
59.	Camera Elektronik	Baik	Rp	17.600.000

60.	CCTV	Baik	Rp 17.930.000
61.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Rp. 2.601.795.500
62.	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	Rp. 665.045.000
63.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	Rp 106.380.000
64.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	Rp. 2.347.864.114
65.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	Baik	Rp 287.820.000
66.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Baik	Rp 130.975.000
67.	Konstruksi Pagar	Baik	Rp. 242.985.000
68.	Pintu Gerbang	Baik	Rp 106.390.000
69.	Bangunan/Konstruksi Taman Kantor	Baik	Rp 6.655.000
70.	Konstruksi Jalan Lingkungan Dalam Area Perkantoran	Baik	Rp 191.660.000
71.	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen	Baik	Rp 99.650.000
72.	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	Rp 250.110.000
73.	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	Baik	Rp 152.300.000
74.	Kontruksi Dalam Pengerjaan	Baik	Rp 195.400.000
JUMLAH			Rp 9.427.287.812

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan sebagai bentuk penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah, dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2016-2021 tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun, dengan demikian didalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentaya Hilir Utara memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

Visi dan Misi Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagaimna tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (*Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*), sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan langkah penting agar dalam hal ini perjalanan suatu organisasi dapat mencerminkan apa yang hendak

dicapai sebagai cara untuk memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan menjamin kesinambungan tugas organisasi.

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dirumuskan dengan melihat, menilai dan memberi predikat Kabupaten Kotawaringin yang akan datang, yaitu kondisi ideal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diinginkan. Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah :

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT yang MADANI, DINAMIS, MANDIRI, dan BERDAYA SAING dalam SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN dan SEJAHTERA”.

Visi Kecamatan Mentaya Hilir Utara mengikuti Visi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Renja Kerja (Renja) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019. Diharapkan dengan terumuskannya Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan (*Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*), sebagai bagian rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka Misi Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
- b. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
- d. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Dari 4 (empat) Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara melaksanakan Misi ke 3 (tiga) yaitu :

”MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN yang EFEKTIF dan EFISIEN”.

Kecamatan Mentaya Hilir Utara melaksanakan Misi tersebut, karena sesuai dengan tugas pokok Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah, serta mempunyai fungsi untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan strategis Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagai wujud dari misi guna mewujudkan visi yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, merata dan aktual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan pada Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang ingin dicapai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Dengan indikator :

- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Persentase Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang

2. Meningkatnya Penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dengan indikator :

- Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas
- Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
- Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan
- Jumlah PKK desa/kelurahan yang aktif

3. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan.

Dengan indikator :

- Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani
- Jumlah petugas linmas di kecamatan, desa/kelurahan

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Dengan indikator :

- Nilai AKIP Kecamatan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sesuai dengan tujuan yang diuraikan diatas, maka sasaran yang dicapai dan

dituangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara periode pembangunan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Dengan indikator sasaran, antara lain :

- a. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- b. Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.

2. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa/kelurahan;

Dengan indikator sasaran, antara lain :

- a. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas;
- b. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi;
- c. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan;
- d. Jumlah PKK desa/kelurahan aktif.

3. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban lingkungan;

Dengan indikator sasaran, antara lain :

- a. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani;
- b. Jumlah petugas linmas di kecamatan dan desa/kelurahan.

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Dengan indikator sasaran, antara lain :

- a. Nilai AKIP Kecamatan.

Ada 17 (tujuh belas) program yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian tujuan sasaran dan strategi Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
10. Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan.
11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
12. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
15. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Program Pembinaan/Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga.
17. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018 memiliki 17 (tujuh belas) program dengan didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang sinergis dalam pelaksanaan dan terealisasi pada Tahun Anggaran 2019.

F. ISU STRATEGIS

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Mentaya Hilir Utara selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat;
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima.

Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersikap indikatif, yaitu :

1. Pembinaan aparatur/pegawai yang ada di Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa/Kelurahan;
2. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
3. Pembinaan perlindungan masyarakat (linmas) dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum;
4. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan;
5. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah.
6. Permasalahan yang menjadi agenda tahunan yaitu kasus kebakaran hutan dan lahan.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Penetapan

kinerja sendiri merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

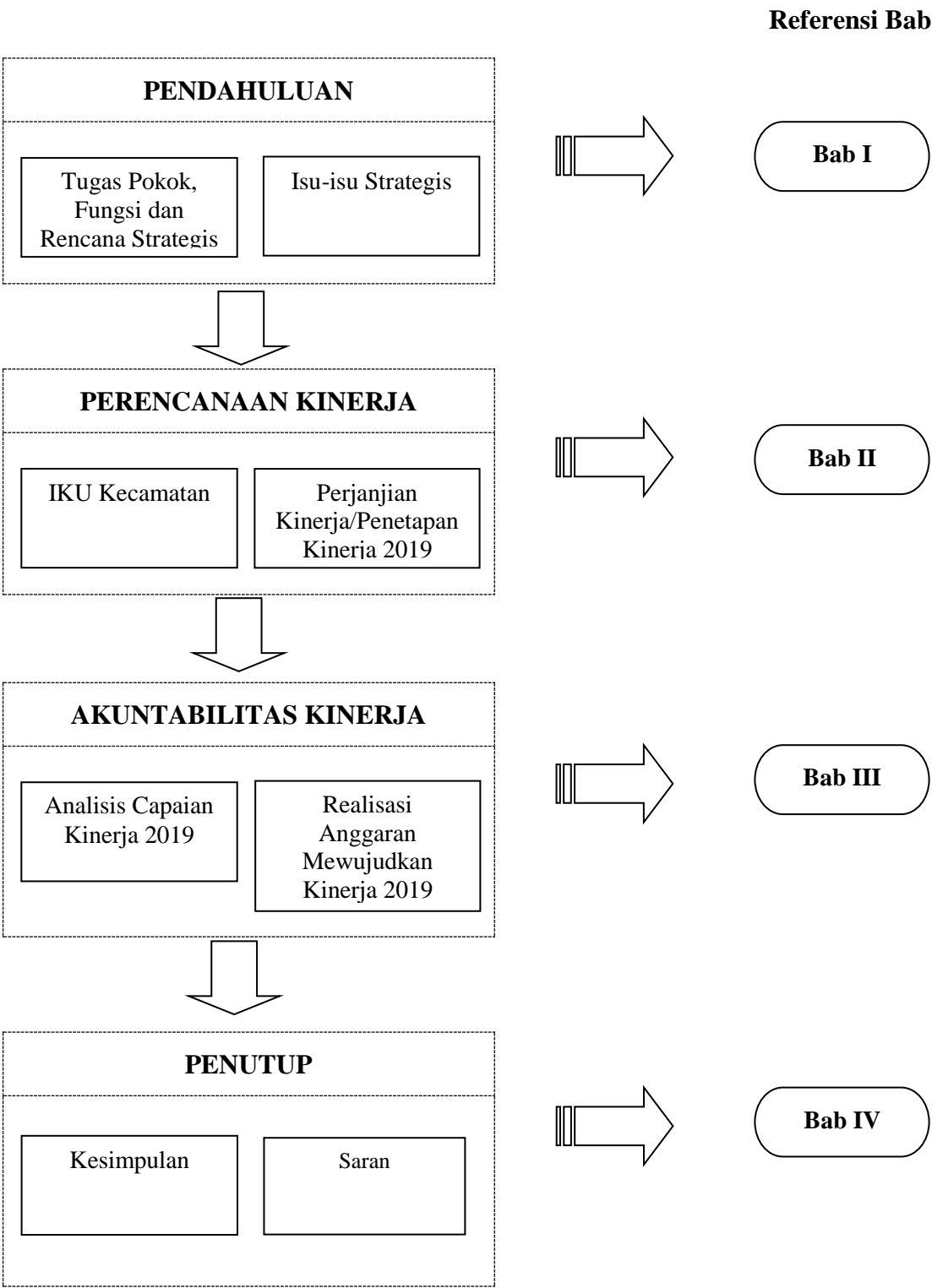
BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dapat di ilustrasikan pada gambar berikut ini :

Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2019



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 ke RPJMD Tahun 2016-2021 baru ditandatangani pada bulan Nopember 2016, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD/PD baru ditandatangani pada Desember 2016 (Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur). Disamping itu adanya saran dari evaluator LKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan Renstra SOPD agar direvisi/disesuaikan kembali, sebagai dampak penyesuaian tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan juga.

Dengan ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) SOPD di Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 6 Oktober 2017, maka mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap semua dokumen Perencanaan Kinerja di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, seperti Indikator Kinerja Utama dokumen (IKU) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mentaya Hilir Utara untuk Camat/Kepala SOPD, dan pejabat eselon III (Sekcam) serta Pejabat eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Lurah) juga ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2017.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019 sebagai berikut :

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mentaya Hilir Utara

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei kepuasan masyarakat (Permenpan 16 Tahun 2014 dan SK Menpan Nomor 25 Tahun 2014)
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah usulan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dibandingkan dengan Jumlah usulan hasil musrenbang desa yang disampaikan ke Kecamatan Mentaya Hilir Utara dikalikan 100%
3.	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	Jumlah Desa yang selesai tata batas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara 100%
4.	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang dievaluasi dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara 100%
5.	Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	Jumlah BUMDesa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dikalikan 100%
6.	Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	Data jumlah PKK Desa aktif
7.	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang ditangani dibandingkan dengan Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di masyarakat dikalikan 100 %
8.	Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah petugas Linmas Kecamatan / Desa yang dilatih / dibina
9.	Nilai AKIP Kecamatan	Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip) Kecamatan oleh Inspektorat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Rencana Kinerja Tahun ini memuat berbagai indikator kinerja yang berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberikan, suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu. Selain itu, indikator mengandung ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian atas suatu sasaran. Indikator kinerja adalah petunjuk untuk memahami kinerja yang telah dicapai, seperti seberapa baik suatu organisasi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memenuhi maksud (purpose), kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber

daya yang telah digunakan oleh organisasi atau SOPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SOPD. Indikator kinerja merupakan ukuran atas perilaku yang kritis bagi organisasi atau SOPD namun tidak dapat memecahkan masalah. Secara konkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur di lampiran 2, atau secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran	Target 2019
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik
		2. Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	3. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100
		4. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	85
		5. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	80
		6. Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	Desa	7
3.	Meningkatnya Peningkatan ketentraman keteriban lingkungan	7. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	85
		8. Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Orang	50
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	9. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	56

C. PENETAPAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, hendaknya memperhatikan Kontrak Kerja, dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan tahunan, dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan kinerja, dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap instansi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi

Pada setiap akhir tahun periode, instansi atau SOPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja biasanya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dilaporkan oleh instansi atau SKPD dalam Laporan Kinerja atau biasa disebut LKIP. LKIP instansi atau SOPD ini disampaikan kepada Bupati, dan LKIP dapat dimanfaatkan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 adalah perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara 2019 yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentaya Hilir Utara tahun 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara meliputi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/Kelurahan
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019, secara garis besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Program	Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.	1.Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	1 Program pelayanan administrasi perkantoran	747.106.200	APBD
				2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.067.865.075	APBD
				3 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	71.610.000	APBD
				4 Program penataan administrasi kependudukan	29.545.075	APBD
				5 Program Penataan Daerah otonomi baru	169.060.000	APBD
		2.Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	100	1 Program perencanaan pembangunan daerah	9.600.000	APBD
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	3.Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100	- Sudah dilaksanakan	-	-
		4.Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	85	1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	5.110.000	APBD
				2 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	51.000.000	APBD
		5.Persentase lembaga perekonomian milik desa	80	1 Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	15.000.000	APBD
		6.Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	7	2 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	80.165.000	APBD
3.	Meningkatnya ketenteraman keteriban lingkungan	7.Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	85	1 Program Pengendalian Kebakaran Hutan	8.700.000	APBD
				2 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	4.200.000	APBD
				3 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	6.450.000	APBD
			50	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	48.754.000	APBD
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	8.Nilai AKIP Kecamatan	56	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.125.000	APBD

Jumlah anggaran yang dikelola Kecamatan Mentaya Hilir Utara Pada Tahun 2019 sebesar Rp.4.122.958.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.784.191.928, sedangkan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.1.787.667.650 dengan realisasi sebesar Rp.1.532.500.667 dan Belanja Langsung Rp.2.335.290.350 dengan realisasi sebesar Rp. 2.251.691.261 Sedangkan belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 Rp. 2.230.944.261,-

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1,2,3, dan 4.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.sebagai suatu entitas organisasi Kecamatan Mentaya Hilir Utara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melaui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Secara keseluruhan hampir sebagian besar sasaran strategis berikut indikator. Terhadap program, kegiatan, sasaran maupun target indikator kinerja dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	> 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	< 81 %	Kurang Berhasil

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (Empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator sasaran (Kinerja output) yang harus dilaksanakan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2019,dapat dilihat padaTabel 3.2 Berikut:

Tabel 3.2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori Capaian Sasaran Strategis	Capaian
1	2	3
1.	Baik Sekali	-
2.	Baik	100 %
3.	Cukup	-
4.	Kurang	-

Dari 4 (empat) sasaran diatas,pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan,sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Pencapaian Target Sasaran Tahun 2019

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian							
			Baik Sekali		Baik		Cukup		Kurang	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	2	-	-	2	100	-	-	-	-
2.	Sasaran 2	4	-	-	4	100	-	-	-	-
3.	Sasaran 3	2	-	-	2	100	-	-	-	-
4.	Sasaran 4	1	1	112	-	-	-	-	-	-
Jumlah		9	-	-	9	100	-	-	-	-

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terdapat 4 (Empat) sasaran yang mencakup 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran,diketahui bahwa 4 (empat) indikator atau 100 % baik. Dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah ” **Berhasil**” dengan nilai **99,04%**.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA TAHUN 2019

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai didapat dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Hasil Pengukuran dan pencapaian Kinerja sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 5.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, analisis capaian kinerja pada Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut:

1

Sasaran :
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima**” didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan” diukur melalui 2 (Dua) indikator.

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019 dan Perbandingan dengan Target Akhir Rensta Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100	Baik	100
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dapat diukur melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Prosentase usulan yang

tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara untuk Kecamatan Mentaya Hilir Utara Indikator Rata-rata Indeks Kepuasan telah dilakukan melalui angket yang disebarkan sebanyak 200 responden.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran dalam “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima” adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam katagori berhasil.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1
2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD diKecamatan	%	100	100

1. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)

Capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Mentaya Hilir Utara seperti program PATEN melalui Sekretariat Kecamatan dan Seksi Administrasi pada Tahun 2019 telah dilakukan melalui komponen Survey yaitu kuisioner dengan melibatkan syarat minimal 200 Responden dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) **81,70** atau Baik dengan Unsur-unsur pelayanan dalam survey terdiri antara lain: Kesesuaian persyaratan pelayanan,kemudahan prosedur pelayanan,kecepatan waktu pelayanan,kewajaran biaya/tarif pelayanan,kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan,kompetensi kemampuan petugas pelayanan,kesopanan dan keramahan petugas pelayanan,fasilitas sarana dan prasarana,penanganan pengaduan pelayanan.

Kegiatan pelayanan publik dapat dilaksanakan seperti Pelayanan PATEN contohnya Register Pembuatan Kartu Keluarga,Register Pembuatan E-KTP, Register surat keterangan pindah datang WNI,Register surat keterangan tidak mampu, Register surat keterangan pindah

datang, Rekomendasi pernikahan, Surat izin usaha mikro dan kecil, Izin mendirikan bangunan, Surat izin tempat usaha, Izin reklame, Perubahan data kependudukan dan Perekaman E-KTP.

Kegiatan Survey tentang kepuasan masyarakat telah dilakukan pada Tahun 2019 akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain:

- a. Kondisi/letak geografis Kecamatan Mentaya Hilir Utara dimana 5 (Lima) Desa berada di wilayah Selatan dan 2 (Dua) desa berada terpisah mendekati kecamatan Telawang yaitu Desa Pondok Damar dan Desa Natai Baru sehingga untuk urusan administrasi ke dua desa tersebut lebih memakan waktu dibandingkan kelima desa yang lain.
- b. Survey kepuasan masyarakat masih dilakukan di kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara belum ke desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Adapun Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet, jasa kebersihan kantor, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman kegiatan/rapat, dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dan tujuan nya untuk pendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 747.106.200,- dan realisasi sebesar Rp. 704.254.237,- dan penyerapan anggaran sebesar 94,26 %

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya tersedianya pembangunan gedung kantor baru, pembangunan gedung tempat ibadah, dan renovasi pagar kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan tersediannya pemeliharaan terhadap gedung kantor, Tersediannya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, tersediannya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.067.865.075,- dan realisasi sebesar Rp. 1.044.821.413,- dengan penyerapannya sebesar 97,84 %

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output dari program dan kegiatan didalamnya adalah terlaksanya peningkatan kapasitas/pengetahuan pegawai kecamatan guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Serta Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa Dengan pagu anggaran Rp. 71.610.000,- realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp. 71.610.000,- atau dengan penyerapan anggaran sebesar 100 %

- d. Program Penataan Administrasi kependudukan
- Ouput dari program kegiatan ini adalah tersediannya petugas pelayanan perekaman E-KTP di Kecamatan dengan tujuan mempercepat proses pelayanan tanpa harus ke Kabupaten
- Dengan pagu Rp. 29.545.075,- realisasi sebesar Rp. 29.005.202,- dengan penyerapan anggaran sebesar 98,17 %
- e. Program Penataan Daerah otonomi Baru
- Output dari program kegiatan ini adalah Jumlah Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional dan Daerah yang mencakup kegiatan keagaamaan seperti MTQ,Safari Ramadhan, BBRGM,Kegiatan hari-hari besar nasional lainnya, dengan pagu Rp.169.060.000,-realisasi sebesar Rp.159.710.000,-dengan penyerapan anggaran sebesar 94,47 %.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Program/kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100 %	747.106.200	704.254.237	94,26 %
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	Lembar	820	683	83 %	3.900.000	3.795.000	97,31 %
	Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air,listrik dan internet	Jumlah rekening yang dibayar	Bulan	12	12	100 %	33.000.000	32.128.600	97,36 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peratan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bidang	6	6	100 %	24.250.000	22.233.600	91,68 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Buah	15	9	60 %	6.100.000	3.567.900	58,49 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	Bulan	12	12	100 %	242.400.625	239.161.212	98,66 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kebersihan lingkungan kantor	Bulan	12	12	100 %	34.127.075	33.550.502	98,31 %
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Peningkatan Pelayanan Kepada	Bulan	12	12	100 %	21.320.000	21.320.000	100 %

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2019

		Masyarakat							
	Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan Pengandaan	Lembar	41.290	37.782	92 %	15.198.900	11.336.800	74,59 %
	Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalansi listrik/penerangan kantor	Jenis	15	15	100 %	4.384.600	3.714.900	84,73 %
	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Bulan	12	12	100 %	5.475.000	3.970.000	72,51 %
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksannya Penyediaan Bahan Logistik sebagai penunjang pelayanan terhadap kinerja aparatur	Bulan	12	12	100 %	11.800.000	5.209.523	44,15 %
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Semangat Kerja dan Stamina Aparatur	Orang	1.480	2055	139 %	86.250.000	65.406.200	75,83 %
	Kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Terpenuhinya Menghadiri Undangan dan Panggilan yang pelaksanaannya di luar daerah	Kali	12	12	100 %	143.250.000	143.250.000	100 %
	Kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	Tersedianya kondisi Perencanaan antar kabupaten dan kecamatan	Kali	190	190	100 %	115.610.000	115.610.000	100 %
2.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	Buah/Unit	4 Buah/unit	4 Buah/unit	100 %	1.067.865.075	1.044.821.413	97,84 %
	KegiatanPembangunan Gedung kantor	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kerja Pegawai yang Memadai	Buah/unit	4 Buah/unit	4 Buah/unit	100 %	779.480.000	776.291.000	99,59
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kerja Pegawai yang Memadai	Buah/unit	8 Buah/unit	8 Buah/unit	100 %	43.750.000	41.028.100	93,78
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kerja Pegawai yang Memadai	Buah/unit	8 Buah/unit	8 Buah/unit	100 %	67.350.000	65.284.500	96,93
	Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair yang dibeli	Buah/unit	8 Buah/Unit	8 Buah/Unit	100 %	36.100.000	33.022.500	91,48
	KegiatanPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya suasana yang kondusif terhadap lingkungan Kerja Pegawai	Buah	1 Buah/unit	1 Buah/unit	100 %	20.000.000	19.987.500	99,94
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa service,suku cadang dan bahan bakar minyak serta kelengkapan surat pajak kendaraan dinas	Buah	14 Unit	19 Unit	136 %	108.685.075	99.200.313	91,27
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpelihanya Perlengkapan Gedung Kantor	Buah	7 Buah/unit	11 Buah/Unit	157 %	6.500.000	6.447.500	99,65
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung Kantor	Buah	7	7	100 %	6.000.000	3.530.000	58,83

3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur/pegawaiyang mengikuti bimtek dan diklat dalam maupun luardaerah	Orang	7	15	214 %	51.035.000	46.835.000	91,77
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur/pegawaiyang mengikuti bimtek dan diklat	Orang	7	15	214 %	67.500.000	67.500.000	100
	Kegiatan Sosialisasi Peraturanperundang-undangan	Jumlah aparatur desa yang mengikuti sosialisasi peraturan-undangan	Orang	30	30	100 %	4.110.000	4.110.000	100
4.	Prorgam Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Perekaman e-KTP dikecamatan	Kali/Tahun	12	12	100 %	29.545.075	29.005.202	98,17
	KegiatanPembentukan dan Penataan SistemKoneksi(NIK)	Terlaksananya Perekaman e-KTP dikecamatan	Kali/Tahun	12	12	100 %	29.545.075	29.005.202	98,17
5.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional dan Daerah	%	100	100	100 %	169.060.000	159.710.000	94,47

2. Pencapaian Usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan

Capaian Kinerja indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah sebesar 100% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai terget yang diperjanjikan.

Tahun 2019 merupakan Tahun keempat Renstra, capaian Tahun 2019 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 yaitu 100 %, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %

Selain itu juga mengenai perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	Realisasi	%	100	100
		Capaian	%	100	100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2021 yaitu 100 maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang diperoleh dari Kepala Seksi Pembangunan berasal dari Musrenbang Desa dan Musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Data Usulan Musrenbang Kelurahan/Desa yang tertampung pada Musrenbang RKPD di Kecamatan

No.	Desa	Jumlah Usulan pada Musrenbang Kelurahan/Desa	Usulan pada musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Mentaya Hilir Utara		
			Usulan yang tertampung/Prioritas	Usulan Yang tidak disepakati	Jumlah
1	2	3	4	4	6
1.	Bagendang Hulu	20	20	2	22
2.	Bagendang permai	19	19	1	20
3.	Bagendang Hilir	53	53	2	55
4.	Bagendang Tengah	11	11	4	15
5.	Sumber makmur	10	10	3	13
6.	Natai Baru	10	10	1	11
7.	Pondok damar	9	9	2	11
Jumlah		132	132	15	147

Usulan yang disampaikan oleh desa merupakan usulan yang menjadi prioritas desa tersebut untuk tahun 2019 .Semua usulan tersebut semuanya di rekapitulasi sebagai usulan Kecamatan Mentaya Hilir Utara dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan perhitungan sebagai berikut:

Usulan yang tertampung dalam hasil = Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

=

Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang tertampung

Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang disampaikan ke Kecamatan

$$\frac{132}{132} \times 100\% = 100\%$$

Program pendukung capaian indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.000 dan realisasi sebesar Rp. 9.600.000 atau penyerapannya sebesar 100 %

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dapat dilihat dalam tabel 3.9

Tabel 3.9
Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Usulan yang tertampung dalam Hasil Musrenbang RKPD diKecamatan Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prorgam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya usulan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Persentase	100	100	100 %	9.600.000	9.600.000	100 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terwujudnya usulan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Persentase	100	100	100 %	9.600.000	9.600.000	100 %

2

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran terhadap “Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan” dapat diukur melalui 4 (Empat) indikator.

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Tahun 2019
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian %
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100	100	100	100	100

2.	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	%	85	85	100	97	97
3.	Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	%	80	71,42	89,27	90	90
4.	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Desa	7	6	85,71	7	7
Capaian Sasaran					93,74%		100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran terhadap **“Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan”** adalah sebesar **93,74 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian **Berhasil**.

Sasaran meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat diukur dengan 4 (empat) indikator yang diperjanjikan yaitu:

1. Capaian Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas

Capaian Kinerja indikator Desa yang telah selesai tata batas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan

Pada Tahun 2016 kegiatan Tapal batas desa telah selesai dilaksanakan sehingga Target Renstra sampai tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2016 melalui pemasangan konstruksi Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Batas Antara (PBA) yang merupakan tugu batas antar desa yang ada di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara serta terbitnya Peta Tapal Batas Desadan Kecamatan dari Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Mentaya Hilir Utara.sehingga tidak ada program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini karena telah selesai dilaksabakan pada Tahun 2016.

Selain itu juga mengenai perbandingan **realisasi kinerja** sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	Realisasi	%	100	100
		Capaian	%	100	100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019 yaitu 100 % maka capaian kerjanya mencapai 100%.

2. Pencapaian Desa/Kelurahan tertib Administrasi

Capaian Kinerja indikator persentase desa yang tertib administrasi adalah sebesar 85 % dari target 85 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja 2019, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 merupakan Tahun keempat Renstra, capaian tahun 2019 adalah 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2021 yaitu 100 maka capaian kerjanya.

Semua desa diKecamatan Mentaya Hilir Utara telah di evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dengan Perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Persentase Desa/ Kelurahan tertib Administrasi} &= \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan}} \times 100 \% \\ &= \frac{7}{7} \times 100\% = 100 \% \end{aligned}$$

Data Pendukung capaian kinerja indikator persentase Desa yang tertib administrasi diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Penilaian Desa/Kelurahan tertib administrasi yaitu melalui pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Program tersebut telah dilaksanakan oleh Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan pada Tahun 2019 Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar desa lebih tertib administrasi dan aktif antara lain:

- Melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ruang lingkup evaluasi sebagai berikut:
 - a. Aspek administrasi, meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa
 - b. Aspek Legalitas, meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

- c. Aspek Kebijakan, meliputi konsistensi rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa dengan Dokumen Perencanaan Desa, Yaitu RPJMDesa dan RKP Desa
- d. Aspek Struktur Anggaran, identifikasi subtansi anggaran dalam struktur APBDDesa meliputi: pendapatan, belanja dan Pembiayaan
- Melakukan monitoring dan fasilitasi proses identifikasi dan inventarisasi jenis-jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa di desa
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, Pelaporan dan kelengkapan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) akhir tahun dana desa
- Melakukan Pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan pencairan dana APBDDesa yang diajukan oleh Desa
- Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bagi Pemerintah Desa se- Kecamatan Mentaya Hilir Utara
- Untuk Tahun 2019 karena permasalahan administrasi dan berbenturan dengan kegiatan lain yang menumpuk pada awal tahun dan desa yang ditujuk untuk mengikuti kegiatan Lomba desa yaitu Desa Bagedang Hilir belum siap sehingga Tahun 2019 ini Kecamatan Mentaya Hilir Utara tidak mengikuti kegiatan rutin Perlombaan Desa yang didalamnya terdapat beberapa kriteria dalam lomba desa meliputi beberapa bidang antara lain: data profil desa, potensi dan tingkat perkembangan desa: pemberdayaan bidang pendidikan, pemberdayaan bidang kesehatan, pemberdayaan bidang keamanan dan ketertiban, bidang pemerintahan, bidang ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Program yang mendukung capaian kinerja indikator Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi, adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksannya kegiatan evaluasi perkembangan desa/Kelurahan dan mengetahui skor/nilai Desa/Kelurahan
Dengan Pagu anggaran sebesar Rp.5.110.000,- dan realisasi sebesar Rp.5.110.000,-
Penyerapan anggaran sebesar 100%
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan APBDes
Dengan Pagu anggaran sebesar Rp.51.000.000 dan realisasi Rp.50.627.400,- atau penyerapannya sebesar 99,27 % .

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.3.12
program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persenrase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya pengevaluasian Desa di Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Desa	7	7	100 %	5.110.000	5.110.000	100 %
	Kegiatan evaluasi pengembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa Yang dievaluasi	Desa	7	7	100 %	5.110.000	5.110.000	100 %
2.	Prorgam Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Kapasitas SDM bagi Aparatur Desa mengenai Penyusunan rancangan Perdes tentang APBDesa	Desa	7	7	100 %	51.000.000	50.627.400	99,27 %
	Kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Meningkatnya Kapasitas SDM bagi Aparatur Desa mengenai Penyusunan rancangan Perdes tentang APBDesa	Desa	7	7	100 %	51.000.000	50.627.400	99,27 %

3. Pencapaian Lembaga Perekonomian Milik Desa

Capaian Kinerja indikator persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa adalah sebesar 71,42 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 89,27 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Data pendukung capaian kinerja indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Untuk Lembaga Perekonomian desa atau sebutan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes,maka Lembaga Perekonomian milik desa diKecamatan Mentaya Hilir Utara terdapat 5 (lima) Bumdes Desa yang aktif dan terdapat kepeguruan yaitu Bumdes Desa Bagendang Hulu, Bumdes Desa Bagendang Permai,Bumdes Desa Bagendang Tengah,Bumdes Bagendang Hilir dan Bumdes Desa Pondok Damar,selain itu terdapat Bumdes bersama dengan unit nya berupa mini market dengan nama MHUMart,Bumdes simpan pinjam,Bumdes Kredit barang-barang elektronik yang merupakan Bumdes bersama 7 Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Dengan Perhitungan sebagai berikut:

Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa

=

Jumlah BUMDES yang ada diKecamatan

Jumlah Desa yang ada di Kecamatan

X100 %

=

5

7

x 100%

= 71,42 %

Program pendukung capaian indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa,adalah Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah dengan kegiatan pelaksanaan Sampit Expo, dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 dan realisasi sebesar Rp.14.580.909,- atau penyerapan anggaran sebesar 97,21 %

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa, dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Kecamatan dan Desa	Kegiatan	1	1	100 %	15.000.000	14.580.909	97,21 %

38

	Kegiatan Pelaksanaan Sampit Expo	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Kecamatan dan Desa	Kegiatan	1	1	100 %	15.000.000	14.580.909	97,21 %
--	----------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	---	---	-------	------------	------------	---------

4. Pencapaian Jumlah PKK Desa/Kelurahan Aktif

Capaian kinerja indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif adalah sebesar 6 Desa dari 7 Desa yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **85,71 %** atau belum mencapai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Adapun hasil penilaian PKK Desa/Kelurahan yang aktif/tidak aktif, sebagaimana table 3.14 berikut :

Tabel 3.14
Data PKK Desa/Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara

No.	Kriteria Aktif	PKK Kelurahan/Desa					
		Desa Bagendang Hulu	Desa Sumber Makmur	Desa Bagendang Hilir	Desa Bagendang Permai	Desa Natai Baru	Desa Pondok Damar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PKK Kelurahan/Desa	√	√	√	√	√	
2	Pertemuan Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√
3	Kepengurusan/keanggotaan lengkap sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	√
4	Kegiatan PKK Berjalan (Posyandu)	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel 3.17 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara berjumlah 6 (enam) PKK Desa/Kelurahan , dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan untuk mengetahui aktif/tidaknya PKK Desa/Kelurahan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) PKK Desa/Kelurahan yang aktif atau semua PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara aktif sebesar (85,71 %).

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dapat dikategorikan aktif sebesar 85,71 %. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti perlu adanya peningkatan pengetahuan/pemahaman pengurus dan anggota PKK Desa/Kelurahan terhadap 10 (sepuluh) pokok program PKK dan berkaitan dengan kelengkapan kebun TOGA PKK.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengintensifkan pembinaan PKK Kecamatan terhadap PKK Desa/Kelurahan, serta melakukan kegiatan sosialisasi program pokok PKK atau pengembangan kreativitas anggota PKK Desa/Kelurahan dengan mengundang PKK Kabupaten atau nara sumber lain. Tahun 2019 PKK Kecamatan dan PKK desa sudah aktif melakukan kegiatan-kegiatan dan aktif mengikuti lomba dimana pada Tahun 2019 PKK Kecamatan telah mendapatkan beberapa piala lomba antara lain:

1. Juara I Penyuluhan Perkarangan dan Hasilnya PKK dalam rangka mendukung Pencegahan Stunting
2. Juara I Busana Batik Kotim dalam rangka Festival Habaring Hurung
3. Juara I Defile dalam rangka Jambore PKK Kab. Kotim Tahun 2019
4. Juara I Festival pangan local Beragam, bergizi, seimbang dan Aman (BBSA)
5. Juara II Yel-yel dalam rangka Jambore PKK Kab. Kotim Tahun 2019
6. Juara II Masakan Khas Daerah Festival Habaring Hurung
7. Juara II Lomba Masak Serba Ikan
8. Juara III Penyuluhan Peran Kelompok Desa Wisma dalam mendukung Pencegahan Stunting
9. Harapan I Lomba Fashion Show Jambore PKK Kab. Kotim Tahun 2019
10. Harapan II Penyuluhan Peran PKK dalam Pencegahan Stunting melalui edukasi 100 hari pertama kehidupan
11. Harapan III Representasi Daur Ulang Sampah

Program pendukung capaian indikator persentase PKK Desa/Kelurahan Aktif adalah Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.980.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp.34.880.790,- atau penyerapan anggaran sebesar 83,09 %. Walaupun realisasi penyerapan anggaran sangat rendah, akan tetapi tujuan pembinaan PKK Desa/Kelurahan tercapai, sehingga didapatkan hasil semua PKK Desa/Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara aktif.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif, dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15
Program/Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
PKK Desa/Kelurahan Aktif
Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Terlaksananya pembinaan terhadap kegiatan PKK di Kec. Mentaya Hilir Utara	Kelompok	7	6	85 %	80.165.000,-	78.517.100,-	97,94 %
	Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	Terlaksananya pembinaan terhadap kegiatan PKK di Kec. Mentaya Hilir Utara	Kelompok	7	6	85%	80.165.000,-	78.517.100,-	97,94 %

3

Sasaran :
Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Lingkungan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “ Meningkatkan **Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan** “diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani dan indikator jumlah petugas linmas di kecamatan/desa”.

Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 3
“Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan” Tahun 2019
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	85	77	90,58	100	100
2	Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa	Orang	50	45	90	45	100
Rata- rata Capaian Kinerja					90,29		100

Sasaran Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan diukur melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani dan jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa

capaian indikator kinerja sasaran “ Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” adalah sebesar 90,29 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Baik” .

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.17 berikut

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3
Tahun 2018 dan 2019

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	100	77
2	Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa	Orang	45	45

1. Pencapaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantibmas) yang ditangani.

Capaian kinerja indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani adalah sebesar **77 %** dari target sebesar **85 %** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **90,58 %** atau mencapai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Pelanggaran Trantibmas ditangani yang diperoleh dari Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Data diperoleh dari laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan atau sengketa tanah/ lahan yang perlu ditindaklanjuti, dengan penilaian sesuai tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Data Jumlah Pelanggaran/ Laporan Kejadian
Yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun 2019

No	Jenis Pelanggaran/ Laporan Kejadian	Pelanggar an/ Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Kepala Seksi yang menangani
1	2	3	4	5	6
1	Sengketa Tanah/ Lahan	4	2	50 %	Tata Pemerintahan
2	Kebakaran Rumah	2	2	100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	14	14	100%	
3	Banjir	1	1	100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah		21	19	90,47 %	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis pelanggaran/ laporan kejadian yang paling banyak masuk yaitu berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan karena musim kemarau pada Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Mentaya Hilir utara melalui Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan melalui Desa serta solusi berupa dibentuknya Tim Masyarakat Perduli Api (MPA) yang berjumlah 30 Orang beserta Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang melibatkan lintas sector seperti Koramil, Polsek,Masyarakat.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Prosentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	=	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan}}$	x	100%
	=	19/21	x	100%
				=90,47 %

Data tersebut diambil berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan Mentaya Hilir Utara, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Kepala Desa yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsinya untuk penyelesaian laporan pelanggaran keamanan dan ketertiban tersebut.

Adapun permasalahan sengketa tanah yang belum dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan selanjutnya yaitu: kasus Demo di Lahan Menteng Jaya Sawit Persada yaitu berupa Tuntutan bagi hasil 30 % dari Kebun Hutan Rakyat (HTR) serta kasus yang tidak bisaa ditangani di Kecamatan dan berlanjut di Kabupaten.

Program pendukung capaian indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan
Output dari program beserta kegiatan- kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan, sehingga tidak terjadi sengketa lahan/ tanah di masyarakat.
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 85,71%;
- b. Program pengendalian Kebakaran Hutan
Output dari program beserta kegiatan- kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan/ lahan dengan tujuan dapat

meminimalisir kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara meskipun pada Tahun 2019 kasus ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.700.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 8.400.00,- atau penyerapan anggaran sebesar 96,55%;

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Output dari program beserta kegiatan- kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan pembinaan pengurus RT/RW se- Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dengan tujuan agar Ketua RT/RW dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing- masing.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.450.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 4.200.000,- atau penyerapan sebesar 65,12%.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Pelanggaran Trantimas yang ditangani, dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Pelanggaran Trantibmas Yang Ditangani
Tahun 2019

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi terhadap Konflik Pertanahan	Kasus	2	2	100%	4.200.000,-	3.600.000,-	85,71 %
	Kegiatan Fasilitas penyelesaian konflik – konflik pertanahan	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi terhadap Konflik Pertanahan	Kasus	2	2	100%	4.200.000,-	3.600.000,-	85,71 %
2	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan sosialisasi Karhutla	Jumlah	7	7	100%	8.700.000,-	8.400.000,-	96,55 %
	Kegiatan Koordinasi Pengendalian	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi	Persentase	100%	100 %	100%	4.200.000,-	4.200.000	100%

	kebakaran hutan	Karhutla							
	Kegiatan Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Peserta	100	92	92 %	4.500.000,-	4.200.000,-	93,33 %
3	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terlaksananya pembinaan terhadap ketua RT/RW	Persentase	100%	80%	80%	6.450.000	4.200.000,-	65,12 %
	Kegiatan Pembinaan pengurus RT/RW se Kecamatan	Terlaksananya pembinaan terhadap ketua RT/RW	Persentase	100%	80%	80%	6.450.000	4.200.000,-	65,12 %

2. Pencapaian Petugas Linmas di Kecamatan/ Desa

Capaian kinerja indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa adalah 45 orang dari target sebanyak 50 orang yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90% sesuai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa yang diperoleh dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mentaya Hilir Utara, sesuai tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20
Petugas Linmas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun 2019

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Jumlah Petugas Linmas
1	2	3
1.	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	10 orang
2.	Desa Bagendang Hulu	5 orang
3.	Desa Bagendang Tengah	5 orang
4.	Desa Bagendang Hilir	5 orang
5.	Desa Sumber Makmur	5 orang
6.	Desa Bagendang Permai	5 orang
7.	Desa Pondok Damar	5 orang
8.	Desa Natai Baru	5 orang
	Jumlah	45 orang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa petugas Linmas Kecamatan/ Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara berjumlah 45 orang dari target 50 orang. Dimana data

petugas Linmas tersebut hanya berasal dari petugas Linmas yang terdaftar di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Faktor yang menghambat pencapaian indikator tersebut karena biasanya petugas Linmas hanya aktif pada saat akan diadakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terutama untuk petugas Linmas TPS.

Pada Tahun 2019 telah dilakukan pendataan ulang petugas linmas dan pembagian seragam baju linmas baik Kecamatan maupun Desa sebagai guna mendukung pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan pada bulan April Tahun 2019 dan pengadaan pakaian linmas sesuai dengan data terakhir jumlah petugas linmas.serta dilakukan kegiatan pembinaan ke RT/RW agar dapat mengaktifkan petugas Linmas RT/RW, terutama untuk menjaga Poskamling RT/RW

Program pendukung capaian indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa adalah

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.754.000,- dan realisasi sebesar Rp.46.908.000,- atau persentase penyerapan anggaran sebesar 96,21%.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa, dapat dilihat pada tabel 3. 21 berikut:

Tabel 3.21
Program Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan/ Desa
Tahun 2019

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pengendalian Kamtibmas yang ditangani	Persentase	85 %	85%	100%	48.754.000,-	46.908.000,-	96,21%
	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pengendalian Kamtibmas yang ditangani	Persentase	85 %	85%	100%	48.754.000,-	46.908.000,-	96,21%

4

Sasaran :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran terhadap “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**” dapat diukur melalui 1(Satu) indikator yaitu Analisis pencapaian nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara adalah sebesar **62,80** dari target sebesar **56** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018,sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **112,14%** .

Data penunjang capaian kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang diperoleh dari Sekretariat Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan,yang berasal dari hasil review Inspektorat atas LKIP Kecamatan Mentaya hilir Utara Tahun 2018,dapat dilihat pada tabel 3.22 Berikut:

Tabel 3.22
Data Nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2018

No.	Komponen Pengukuran AKIP	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	62,51
	a.Perencanaan Strategis	46,06
	Pemenuhan Renstra	86,11
	Kualitas Renstra	53,13
	Implementasi Renstra	41,67
	b. Perencanaan Kinerja Tahunan	58,03
	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	95,83
	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	62,50
	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	58,33
2.	Pengukuran Kinerja	77,04
	a.Pemenuhan Pengukuran	87,50
	b.Kualitas Pengukuran	57,69
	c.Implementasi Pengukuran	50,00
3.	Pelaporan Kinerja	64,66
	a.Pemenuhan Pelaporan	100
	b.Penyajian Informasi Kinerja	64,29
	c.Pemanfaatan Informasi Kinerja	50,00
Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara		62,80

Berdasarkan data diatas maka dapat diambil kesimpulan Penilaian AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019 **62,80** dari 3 komponen pengukuran AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari hasil evaluasi dari Inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.23
Nilai AKIP Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	56	62,80	112,14
		Capaian Sasaran			112,14

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan** ”adalah sebesar **112,14 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Untuk meningkatkan penilaian AKIP kecamatan Mentaya Hilir Utara akan terus berupaya melakukan perbaikan,antara lain:

- a. Indikator kinerja sasaran agar memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik
- b. Target kinerja agar ditetapkan dengan baik
- c. Dokumen renstra agar selaras dengan dokumen RPJMD, menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam kontrak kerja,digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran serta direviu secara berkala
- d. Dokumen PK agar selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen RPJMD/Renstra dan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam kontrak kerja
- e. Penetapan Kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan,pengorganisasian kegiatan.
- f. Tujuan agar berorientasi outcome
- g. Dokumen Renstra agar direviu secara berkala
- h. Penetapan kinerja agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasiankegiatan.
- i. IKU agar dapat diukur secara obyektif,cukup untuk mengukur kinerja dan selaras dengan renstra

- j. Indikator kinerja sasaran agar dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur, cukup untuk mengukur sasarannya, diukur realisasinya secara akurat, renstra unit kerja agar selaras dengan indicator kinerja RPJMD
- k. IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja, direviu secara berkala
- l. Pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
- m. LKIP agar menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
- n. Informasi kinerja dalam LKIP agar dapat diandalkan
- o. Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta untuk peningkatan kinerja.

Faktor penghambat optimalisasi peningkatan nilai AKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara, antara lain:

- 1. adanya perubahan pada struktur organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang mengakibatkan kepala sub bagian dibawah Sekretariat Kecamatan yang tadinya 3 (tiga) bagian menjadikannya 2 (dua) bagian sehingga penambahan beban kerja
- 2. Kurangnya jabatan fungsional yang berada dibawah kepala suba bagian yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Adapun Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran indikator Nilai AKIP Kecamatan adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Pelaporan akhir Tahun, dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.125.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.047.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 98,11% .

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai AKIP Kecamatan, dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.24
program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai AKIP Kecamatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan dan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	100	100	100 %	4.125.000	4.047.000	98,11%

	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Investasi Daerah								
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Kahir Tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	5 Dokumen	2 Dokumen	40 %	4.125.000	4.047.000	98,11%

Selain itu juga mengenai perbandingan **realisasi kinerja** sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.25 berikut :

Tabel 3.25

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Nilai AKIP Kecamatan	Realisasi	%	97	112,14
		Capaian	%	97	112,14

C. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 mengalokasikan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.639.627.350,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.712.524.550.**

Adapun mengenai Data Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kecamatan Mentaya Hilir Utara untuk tahun anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.26
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019

NO	KODE REKENING	DINAS/PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / (KURANG)		KET
					Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5	BELANJA KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA	4.122.958.000	3.784.191.928	(338.766.072)	91,78	
A.	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.787.667.650	1.532.500.667	(255.166.983)	85,73	
	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.787.667.650	1.532.500.667	(255.166.983)	85,73	
	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	933.940.000	824.794.697	(109.145.303)	88,31	
	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	115.010.000	88.603.918	(26.406.082)	77,04	
	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	89.600.000	71.400.000	(18.200.000)	79,69	
	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.240.000	-	(9.240.000)	-	
	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	36.400.000	24.950.000	(11.450.000)	68,54	
	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.520.000	44.321.040	(14.198.960)	75,74	
	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000	3.235.649	(2.364.351)	57,78	
	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.191.650	15.277	(1.176.373)	1,28	
	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.940.000	23.319.483	(14.620.517)	61,46	
	5.1.1.01.22	Iuran JKK	6.300.000	1.717.199	(4.582.801)	27,26	
	5.1.1.01.23	Iuran JKM	9.100.000	5.611.508	(3.488.492)	61,46	
	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	484.826.000	444.531.896	(32.761.040)	91,69	
	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	484.825.992	452.064.952	(32.761.040)	91,69	
B.	5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.335.290.350	2.251.691.261	(83.599.089)	96,42	
01.	4.01.4.01.17.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	747.106.200	704.254.237	(42.851.963)	94,26	
1.	4.01.4.01.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.795.000	(105.000)	97,31	
	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.900.000	3.795.000	(105.000)	97,31	
2.	4.01.4.01.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	32.128.600	(871.400)	97,36	
	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000	3.205.690	(394.310)	89,05	
	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000	13.922.910	(477.090)	96,69	
	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000	15.000.000	(0)	100,00	
3.	4.01.4.01.17.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.250.000	22.233.600	(2.016.400)	91,68	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2019

	5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Rumah Tangga	17.750.000	16.983.600	(766.400)	95,68	
	5.2.2.01.16	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer	1.500.000	1.500.000	0	100,00	
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Dekorasi/Tata Rias	5.000.000	3.750.000	(1.250.000)	75,00	
4.	4.01.17.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.100.000	3.567.900	(2.532.100)	58,49	
	5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.100.000	3.567.900	(2.532.100)	58,49	
5.	4.01.4.01.17.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	242.400.625	239.161.212	(3.239.413)	98,66	
	5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.880.000	62.880.000	0	100,00	
	5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000	2.250.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	177.270.625	174.031.212	(3.239.413)	98,17	
6.	4.01.4.01.17.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34.127.075	33.550.502	(576.573)	98,31	
	5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.582.000	4.545.300	(36.700)	99,20	
	5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	29.545.075	29.005.202	(539.873)	98,17	
7.	4.01.4.01.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.320.000	21.320.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.320.000	21.320.000	-	100,00	
8.	4.01.4.01.17.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.198.900	11.336.800	(3.862.100)	74,59	
	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000	158.000	(842.000)	15,80	
	5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.198.900	11.178.800	(3.020.100)	78,73	
9.	4.01.4.01.17.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.384.600	3.714.900	(669.700)	84,73	
	5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.384.600	3.714.900	(669.700)	84,73	
10.	4.01.4.01.17.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	5.475.000	3.970.000	(1.505.000)	72,51	
	5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.475.000	3.970.000	(1.505.000)	72,51	
11.	4.01.4.01.17.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.800.000	5.209.523	(6.590.477)	44,15	
	5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000	4.459.523	(5.540.477)	44,60	
	5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000	750.000	(1.050.000)	41,67	
12.	4.01.4.01.17.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	86.250.000	65.406.200	(20.843.800)	75,83	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2019

	5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.500.000	17.959.000	(16.541.000)	52,06	
	5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000	3.995.700	(4.254.300)	48,43	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	43.500.000	43.451.500	(48.500)	99,89	
13.	4.01.4.01.17.01.18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	143.250.000	143.250.000	0	100,00	
	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.250.000	143.250.000	0	100,00	
14.	4.01.4.01.17.01.19	Rapat rapat Koordinasi di Dalam Daerah	115.650.000	115.650.000	0	100,00	
	5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.650.000	115.650.000	0	100,00	
02.	1.20.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.067.865.075	1.044.821.413	(23.043.662)	97,84	
1.	1.20.4.01.17.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	779.480.000	776.291.000	(3.189.000)	99,59	
	5 . 2 . 3 . 49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	388.557.000	387.645.000	(912.000)	99,77	
		Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahap IV (Empat) :	192.917.622000	192.295.000	(622.000)	99,68	
		- Jasa Perencanaan	7.170.000	7.000.000	(170.000)	97,63	
		- Kontruksi Fisik	179.220.000	179.095.000	(125.000)	99,93	
		- Jasa Pengawasan	5.377.000	5.300.000	(77.000)	98,57	
		- Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	900.000	-	100,00	
		Belanja Modal Renovasi Pagar Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara:	195.640.000	195.350.000	(290.000)	99,85	
		- Jasa Perencanaan	7.280.000	7.000.000	(280.000)	96,15	
		- Kontruksi Fisik	182.000.000	181.450.000	(550.000)	99,70	
		- Jasa Pengawasan	5.460.000	5.250.000	(210.000)	96,15	

		- Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000	1.650.000	-	100,00	
	5 . 2 . 49 .08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah	390.923.000	388.646.000	(2.277.000)	99,42	
		Belanja Modal Pembangunan Pagar Masjid Nurul Ikhlas Kecamatan Mentaya Hilir Utara	197.762.000	195.400.000	(2.362.000)	98,81	
		- Jasa Perencanaan	7.350.000	7.000.000	(350.000)	97,52	
		- Kontruksi Fisik	183.750.000	183.000.000	(750.000)	99,59	
		- Jasa Pengawasan	5.512.000	5.400.000	(112.000)	97,97	
		Belanja Modal Pembangunan Teras dan Paving Masjid Nurul Ikhlas Kecamatan Mentaya Hilir Utara	193.861.000	193.246.000	(615.000)	99,68	
		- Jasa Perencanaan	7.178.000	7.000.000	(178.000)	97,52	
		- Kontruksi Fisik	179.450.000	179.196.000	(254.000)	99,86	
		- Jasa Pengawasan	5.383.000	5.250.000	(133.000)	98,57	
		- Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	1.800.000	-	100,00	
2.	4.01.4.01.17.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	43.750.000	41.028.100	(2.721.900)	93,78	
	5. 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Dapur	7.000.000	7.000.000	0	100,00	
	5. 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	36.750.000	34.028.100	(2.721.900)	99,08	
3.	4.01.4.01.17.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	67.350.000	65.284.500	(2.065.500)	96,93	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2019

	5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	59.350.000	7.425.000	(75.000)	99,00	
	5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000	6.874.500	(1.125.000)	85,93	
4.	4.01.17.02.10	Pengadaan Meubelair	36.100.000	33.022.500	(3.077.500)	91,48	
	5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair	17.800.000	17.762.500	(37.500)	99,79	
	5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	18.300.000	15.260.000	(3.040.000)	83,39	
5.	4.01.4.01.17.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.987.500	(12.500)	99,94	
	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000	19.987.500	(12.500)	99,94	
5.	4.01.4.01.17.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	108.685.075	99.200.313	(9.484.762)	91,27	
	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.000.000	11.097.500	(1.902.500)	85,37	
	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.200.000	15.194.272	(5.728)	99,96	
	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	50.940.000	43.903.339	(7.036.661)	86,19	
	5.2.2.27.01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	29.545.075	29.005.202	(539.873)	99,17	
6.	4.01.4.01.17.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.500.000	6.477.500	(22.500)	99,65	
	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.500.000	6.477.500	(22.500)	99,65	
7.	4.01.4.01.17.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.000.000	3.530.000	(2.470.000)	58,83	
	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6.000.000	3.530.000	(2.470.000)	58,83	
03.	4.01.4.01.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	71.610.000	71.610.000	0	100,00	
1.	4.01.4.01.17.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	67.500.000	67.500.000	0	100,00	
	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	67.500.000	67.500.000	0	100,00	
2.	4.01.4.01.17.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.110.000	4.110.000	-	100,00	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	300.000	-	100,00	
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	450.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.360.000	3.360.000	-	100,00	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2019

04.	4.01.4.01.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.125.000	4.047.000	-	98,11	
1.	4.01.4.01.17.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.125.000	4.047.000	-	98,11	
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000	2.047.000	-	96,33	
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000	2.000.000	-	100,00	
05.	2.06.4.01.17.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	29.545.075	29.005.202	(539.873)	98,17	
1.	2.06.4.01.17.15.04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter Phase Tahap Awal NIK)	29.545.075	29.005.202	(539.873)	98,17	
	5.2.2.27.01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	29.545.075	29.005.202	(539.873)	98,17	
06.	1.05.4.01.17.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	48.754.000	46.908.000	(1.846.000)	96,21	
	1.05.4.01.17.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	48.754.000	46.908.000	(1.846.000)	96,21	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	1.500.000	0	(1.500.000)	0	
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.0000	0	(60.000)	0	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000	3.150.000	-	100,00	
	5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Linmas	44.044.000	43.758.000	(286.000)	99,35	
07.	2.12.4.01.17.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	15.000.000	14.580.909	(120.000)	97,21	
1.	2.12.4.01.17.15.12	Pelaksanaan Sampit Expo	15.000.000	14.580.909	(120.000)	97,21	
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Dekorasi/Tata Rias	4.000.000	1.330.909	(2.669.091)	33,27	
	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.500.000	8.250.000	(250.000)	97,05	
	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobiliast Darat	500.000	500.000	-	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000	4.500.000	-	100,00	
08.	4.01.4.01.4.01.17.16	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	169.060.000	159.710.000	(9.350.000)	94,47	
1.	4.01.4.01.17.16.03	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	169.060.000	159.710.000	(9.350.000)	94,47	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk/Umbul-umbul	12.000.000	11.843.000	(157.000)	98,69	
	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000	9.000.000	(1.800.000)	83,33	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.260.000	48.615.000	(1.645.000)	96,73	
	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	34.800.000	34.452.000	(348.000)	99,00	
	5.2.2.27.01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	61.200.000	55.800.000	(5.400.000)	91,18	
10.	2.16.4.01.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.500.000	4.500.000	-	100,00	
1.	2.16.4.01.17.17.05	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	4.500.000	4.500.000	-	100,00	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	300.000	-	100,00	
	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000	1.800.000	-	100,00	

LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun Anggaran 2019

	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.400.000	2.400.000	-	100,00	
11.	2.07.4.01.17.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	5.110.000	5.110.000	0	100,00	
1.	2.07.4.01.17.17.16	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	5.110.000	5.110.000	0	100,00	
	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000	700.000	0	100,00	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.410.000	3.150.000	0	100,00	
12.	2.04.4.01.17.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	
1.	2.04.4.01.17.17.01	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	
13.	1.05.4.01.17.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	6.450.000	4.200.000	(2.250.000)	65,12	
	1.05.4.01.17.19.02	Pembinaan Pengurus RT/RW se Kecamatan	6.450.000	4.200.000	(2.250.000)	65,12	
	5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	2.100.000	0	(2.100.000)	0	
	5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000	0	(150.000)	0	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.200.000	4.200.000	0	100,00	
14.	2.07.4.01.17.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	80.165.000	78.517.100	(1.647.900)	97,94	
1.	2.07.4.01.17.19.06	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	80.165.000	78.517.100	(1.647.900)	97,94	
	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.645.000	1.606.000	(39.000)	97,63	
	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000	440.000	(410.000)	51,76	
	5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000	577.000	(23.000)	96,17	
	5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000	1.050.000	(150.000)	100,00	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000	23.978.000	(22.000)	99,91	
	5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	5.000.000	5.000.000	0	100,00	
	5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.950.000	16.950.000	0	100,00	
	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.920.000	28.916.100	(1.003.900)	96,64	
15.	4.03.4.01.17.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9.600.000	9.600.000	-	100,00	
1.	4.03.4.01.17.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	9.600.000	9.600.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	300.000	300.000		100,00	

	5 . 2 . 2 . 06.02	Belanja Pengandaan	900.000	900.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000	8.400.000	-	100,00	
16.	2.07.4.01.17.22	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pegelolaan Keuangan Desa	51.000.000	50.627.400	(372.600)	99,27	
1.	2.07.4.01.17.22.01	Evalusi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	51.000.000	50.627.400	(372.600)	99,27	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000	8.288.000	(112.000)	98,67	
	5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.450.000	21.400.000	(50.000)	99,77	
	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.150.000	11.939.400	(210.600)	98,27	
	5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000	9.000.000	0	100,00	
17.	2.13.4.01.17.22	Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja,Pemuda, Perempuan dan Olah raga	4.500.000	4.500.000	0	100,00	
	2.13.4.01.17.22.01	Pembinaan UKS se-Kecamatan	4.500.000	4.500.000	0	100,00	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	300.000	0	100,00	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.200.000	4.200.000	0	100,00	
18.	2.05.4.01.17.22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	8.700.000	8.400.000	(300.000)	96,55	
1.	2.05.4.01.17.22.03	Pengendalian Kebakaran Hutan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	
2.	2.05.4.01.17.22.05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	4.500.000	4.200.000	(300.000)	93,33	
	5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-umbul	300.000	0	(300.000)	0	
	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.200.000	4.200.000	-	100,00	

Dari data diatas menunjukan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 4.122.958.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp3.784.191.928,00** atau capaian kinerja keuangan **91,78 %**.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran sesuai renstra Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Sasaran, Indikator Sasaran dan Realisasi Keuangan
Kecamatan Mentaya Hilir Utara Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100%	2.085.186.350	2.009.400.852	96,36 %
		Persentase Usulan yang tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100 %	9.600.000	9.600.000	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas	%	100	100	100 %	-	-	-
		Persentase Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	%	85	85	100 %	56.110.000.-	55.737.400	99,33 %
		Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	%	80	71,42	89,27 %	15.000.000	14.580.909	97,21 %
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang aktif	Jumlah	7	6	85,71 %	80.165.000	78.517.100	97,94 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	85	77	90,58 %	19.350.000,-	16.200.000,-	83,72%
		Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Orang	50	45	90 %	48.754.000	46.908.000	96,21 %

4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	56	62,80	112,14 %	4.125.000	4.047.000	98,11 %
Nilai Rata-rata Pencapaian/Jumlah Anggaran						99,04	2.318.290.350	2.234.991.261	96,41 %

Secara umum efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara,dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 99,04 % dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar 96,41 % dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,59 % atau terdapat silpa sebesar Rp. 83.299.089,-

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara disusun sebagai *wujud dukungan* terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat stimulasi dalam mewujudkan good governance dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/ publik.
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukan, menentukan, memberi suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu.
4. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 9 (Sembilan) indikator kinerja sasaran, pada tahun 2019 rata- rata mencapai 99,04 % atau bernilai Baik Sekali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik mencapai 100% melalui 2 (dua) indikator yaitu pencapaian rata- rata indeks kepuasan masyarakat mencapai 100% dari target nilai Baik, dan pencapaian prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan mencapai 100 % yaitu 100 % usulan dari target 100 %;
 - b. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa mencapai 93,74 % melalui 4 (empat) indikator yaitu pencapaian prosentase Desa yang telah selesai tata batas mencapai 100 % dengan realisasi 100 % dari target 100 % pencapaian prosentase Desa yang tertib administrasi mencapai 100% dari target 85 % pencapaian prosentase Lembaga perekonomian milik Desa mencapai 89,27 % dari target 80 % dan Jumlah PKK Desa aktif mencapai 85,71 % dari target 7 Desa;
 - c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan mencapai 90,29 % melalui 2 (dua) indikator yaitu pencapaian persentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani mencapai 90,58

% dari target 85 % dan pencapaian jumlah petugas Linmas Kecamatan/ Desa mencapai 90 % dari target 50 orang terealisasi 45 orang;

- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan mencapai 112,14 %, melalui 1 (satu) indikator yaitu pencapaian Nilai AKIP Kecamatan mencapai 112,14 % dari target nilai 56 terealisasi nilai 62,80.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (empat) sasaran yang mencakup 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 4 (empat) indikator sasaran 100 % Baik dan 1 (satu) indicator dengan capaian sangat baik yaitu 112,14 %

Anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 99,04 % dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar **96,41** % dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,59 %, atau terdapat Silpa sebesar Rp. 83.299.089,- dari Pagu Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp.**2.318.290.350,-** terealisasi sebesar Rp. **2.234.991.261.-**

B. SARAN

Dalam pengumpulan dan penyusunan Data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah secara maksimal karena masing- masing bagian kurangnya sumber daya aparatur pendidikan formil maupun diklat, kurangnya motivasi pegawai dalam segala bentuk kegiatan.

Adapun yang menjadi catatan penting dan merupakan kekurangan dalam penyusunan LKIP Kecamatan Mentaya hilir Utara antara lain:

1. Target Kinerja agar ditetapkan dengan baik dan dengan satuan target yang jelas, terukur dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan menggambarkan sasaran tersebut dapat tercapai.
2. Agar segera melakukan revisi terhadap Dokumen Renstra karena penetapan indikator kinerja menggambarkan kondisi yang tidak relevan lagi seperti contoh penetapan Petugas linmas Kecamatan/desa sangat melampaui target yang telah ditetapkan.
3. Pembuatan IKU (Indikator Kinerja Utama) dapat diukur secara obyektif dan agar direvisi kembali.

Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh berbagai langkah sebagai berikut :

1. Mempertajam penyusunan rencana biaya/ anggaran melalui RKA/ RKT dan DPA dengan melibatkan semua aparatur terkait;
2. Melakukan evaluasi per triwulan atau per semester atau setiap akhir tahun anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal secara intensif dengan pihak Desa dan Masyarakat se Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
4. Membuat dokumentasi, pencatatan dan pengarsipan khusus atas semua data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur/ staf dengan mengikutsertakan dalam Diklat LKIP atau Diklat, bimbingan teknis lainnya yang diperlukan;
6. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran aktifitas pelayanan kepada publik.

Penyusunan LKIP Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kotawaringin Timur ini masih belum sempurna, karena itu perlu sarana/ masukan yang positif pada masa yang akan datang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016-2021

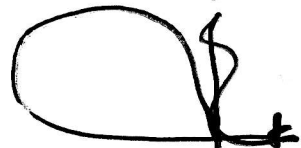
1. Nama/ Unit Organisasi : Kecamatan Mentaya Hilir Utara
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan ekonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah
3. Fungsi
 - a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati Kotawaringin Timur
 - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan
 - f. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun dibidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kecamatan
 - h. Memberikan pelayanan administrasi semua perjanjian yang dilimpahkan
 - i. Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat
 - j. Melaksanakan koordinasi dibidang pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, UPTD, atau unit kerja yang ada di Wilayah Kecamatan
 - l. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintahan dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan
 - m. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di Wilayah Kecamatan
 - n. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan
4. Indikator Kinerja Umum :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA SKPD PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Hasil survei kepuasan masyarakat (Permenpan 16 Tahun 2014 dan SK Menpan Nomor 25 Tahun 2014)	- Sekretariat Kecamatan - Kasi Administrasi - Hasil Survei
		Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	$\frac{\text{Jumlah usulan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara}}{\text{Jumlah usulan hasil musrenbang desa yang disampaikan ke Kecamatan Mentaya Hilir Utara}} \times 100$	- Kasi Pembangunan - Hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang di Kecamatan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					SKPD PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yang selesai tata batas di Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100$	- Kasi Tata Pemerintahan - Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan/Desa di Kecamatan
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100$	- Kasi PMD - Hasil penilaian evaluasi Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	$\frac{\text{Jumlah BUMDesa yang ada di Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara}} \times 100$	- Kasi PMD - Data Desa (BUMDes)
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	Jumlah	Data jumlah PKK Desa aktif	- Kasi PMD - PKK Kecamatan
3.	Meningkatnya Peningkatan ketentraman keteriban lingkungan	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di masyarakat}} \times 100$	- Kasi Tata Pemerintahan - Kasi Trantibum Kecamatan - Polsek Sei. Sampit - Dan Ramil 1015-07 Bagendang
		Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah	Jumlah petugas Linmas Kecamatan / Desa yang dilatih / dibina	- Kasi Trantibum Kecamatan
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kecamatan oleh Inspektorat	- Sekretariat Kecamatan

Bagendang, Januari 2019

Camat Mentaya Hilir Utara



Drs.SAMSURIJAL,M.Si

NIP. 19630316 199308 1 001

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
TAHUN 2019**

Provinsi / Kabupaten : Kalimantan Tengah / Kotawaringin Timur
Nama SOPD : Kecamatan Mentaya Hilir Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	1. Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan.	Nilai	Baik	Baik	100
		2. Persentase Usulan Yang Tertampung Dalam Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100
Capaian Sasaran						100
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa Yang Telah Selesai Tata Batas	%	100	100	100
		2. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	85	85	100
		3. Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	%	80	71,42	89,27
		4. Jumlah PKK Desa Yang Aktif	Desa	7	6	85,71
Capaian Sasaran						93,74
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1. Persentase Pelanggaran Trantibmas yang tertangani.	%	85	77	90,58
		2. Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan dan Desa	Orang	50	45	90
Capaian Sasaran						90,29
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai	56	62,80	112,14
Capaian Sasaran						112,14
Capaian Rata-Rata Kinerja						99,04

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp.4,122.958.000,-

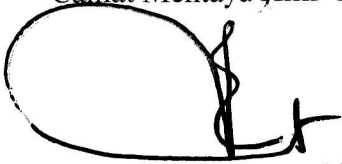
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 3.784.191.928,-

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
						TARGET	%	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Baik	2.085.186.350	Baik	100,00	2.009.400.852	96,36
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
			3. Program penataan administrasi kependudukan						
			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
			5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru						
		2. Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	9.600.000	100 %	100,00	9.600.000	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	3. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	Sudah dilaksanakan	100 %	-	100 %	100,00	-	100,00
		4. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	1. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	85 %	56.110.000	85 %	100,00	55.737.400	99,33
			2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						
		5. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	1. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	80 %	15.000.000	71,42 %	89,27	14.580.909	97,21
		6. Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	1. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	7 PKK	80.165.000	6 PKK	85,71	78.517.100	97,94
3.	Peningkatan ketentraman keteriban lingkungan	7. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	1. Program Pengendalian Kebakaran Hutan	85 %	19.350.000	77 %	90,58	16.200.000	83,72
			2. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan						
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan						
		8. Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	50 orang	48.754.000	45 orang	90	46.908.000	96,21

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
						TARGET	%	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56	4.125.000	62,80	112,14	4.047.000	98,11
				100 %	-	100 %	396,17	-	-
CAPAIAN KINERJA / REALISASI ANGGARAN					2.318.290.350		99,04	2.234.991.261	96,41

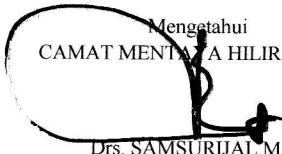
Bagendang, Januari 2019
Camat Mentaya Hilir Utara



Drs.SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			KINERJA
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
		2. Persentase Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang	100
2.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa/kelurahan	1. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100
		2. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	85
		3. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	80
		4. Jumlah PPK desa/kelurahan yang aktif	7 Desa
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	85
		2. Jumlah petugas linmas di kecamatan/kelurahan/desa	50 Orang
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	56

Mengetahui
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA

Drs. SAMSURJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

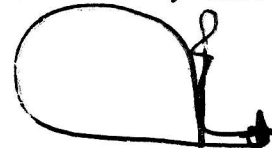
RENCANA AKSI

Nama/ Unit Organisasi : Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Melakukan kegiatan survei IKM di Kecamatan					Sekretariat Kecamatan Mentaya Hilir Utara
		Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	100%	Melaksanakan Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan					Kasi Pembangunan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100%	Melaksanakan Rapat Penetapan Batas Kelurahan/Desa di Kecamatan					Kasi Pemerintahan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	85 %	Melaksanakan Penilaian/ Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa					Kasi PMD Kecamatan Mentaya Hilir Utara
		Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	80 %	Mengikuti Kegiatan Sampit Expo					Kasi PMD dan Kasi Pembangunan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	7	Melaksanakan Pembinaan Pengurus dan Anggota PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa					Kasi PMD Kecamatan Mentaya Hilir Utara
3.	Meningkatnya Peningkatan Ketentraman Keteriban Lingkungan	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	85%	Melaksanakan Rapat Penyelesaian sengketa lahan, dan pembinaan pengurus RT/RW untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat serta kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan					Kasi Pemerintahan dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Polsek Sei Sampit dan Dan Ramil 1015-07 Bagendang
		Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	50 Orang	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Linmas Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk meningkatkan keamanan lingkungan					Kasi Trantib Kecamatan Mentaya Hilir Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	56	Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Laporan Keuangan Kecamatan Mentaya Hilir Utara.					Sekretariat Kecamatan Mentaya Hilir Utara

Bagendang, Januari 2019
Camat Mentaya Hilir Utara



Drs. SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

RENCANA AKSI

Nama/ Unit Organisasi : Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Melakukan kegiatan survei IKM di Kecamatan		√		√	Sekretariat Kecamatan Mentaya Hilir Utara
		Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	100%	Melaksanakan Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	√				Kasi Pembangunan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100%	Melaksanakan Rapat Penetapan Batas Kelurahan/Desa di Kecamatan	√	√	√	√	Kasi Pemerintahan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	85 %	Melaksanakan Penilaian/ Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	√			√	Kasi PMD Kecamatan Mentaya Hilir Utara
		Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	80 %	Mengikuti Kegiatan Sampit Expo	√				Kasi PMD dan Kasi Pembangunan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	7	Melaksanakan Pembinaan Pengurus dan Anggota PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	√	√	√	√	Kasi PMD Kecamatan Mentaya Hilir Utara
3.	Meningkatnya Peningkatan Ketenteraman Keteriban Lingkungan	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	85 %	Melaksanakan Rapat Penyelesaian sengketa lahan, dan pembinaan pengurus RT/RW untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat serta kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	√	√	√	√	Kasi Pemerintahan dan Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Polsek Sei Sampit dan Dan Ramil 1015-07 Bagendang
		Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	50 orang	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Linmas Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk meningkatkan keamanan lingkungan		√			Kasi Trantib Kecamatan Mentaya Hilir Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	56	Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja (LKIP) Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Laporan Keuangan Kecamatan Mentaya Hilir Utara.	√	√	√	√	Sekretariat Kecamatan Mentaya Hilir Utara

Keterangan : √ (Pelaksana Kegiatan)

Bagendang, Januari 2019
Camat Mentaya Hilir Utara



Drs. SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

**LAPORAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2019**

KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Disusun Oleh :

RINI MARYATI, A.Md
Pengatur Tk.I (II/d)
NIP. 19830315 201101 2 020
Plt.Kasubbag Umum dan Pelaporan

PEMERINTAH KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA

**JL. H. M. Arsyad Km. 28 No. 313 Telp. - Kode Pos 74361
BAGENDANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.SAMSURIJAL,M.Si**

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUPIAN HADI,S.IKom**

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagendang, Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H.SUPIAN HADI, S.IKom

Pihak Pertama,
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA

Drs.SAMSURIJAL,M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : Drs.SAMSURIJAL, M.Si
NIP : 19630316 199308 1 001
PANGKAT/GOL : Pembina Tk.I(IV/b)
JABATAN : CAMAT MENTAYA HILIR UTARA
SOPD : KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
TAHUN : 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
				OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase Usulan yang tertampung dalam hasil	Nilai Persentase	Baik 100%
2.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa/kelurahan	1. Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas 2. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi 3. Prosentase lembaga perekonomian milik 4. Jumlah PKK desa/kelurahan y	Persentase Persentase Persentase Jumlah	100% 85% 80% 7 Desa
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1. Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani 2. Jumlah petugas linmas di kecamatan / kelurahan /desa	Persentase Jumlah	85% 50 Orang
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	56

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp685.367.200	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp991.115.075	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rp44.110.000	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp2.240.000	APBD
6.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp28.545.075	APBD
7.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp67.388.000	APBD
8.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp15.000.000	APBD
9.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp180.260.000	APBD
10.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp12.500.000	APBD
11.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp5.110.000	APBD
12.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp4.200.000	APBD
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp6.450.000	APBD
14.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rp44.605.000	APBD
15.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp9.600.000	APBD
16.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp50.600.000	APBD
17.	Program Pembinaan / Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olah Raga	Rp4.500.000	APBD
18.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp8.700.000	APBD
		Rp2.160.290.350	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



H. SUPLIAN HADI, S. Ikrom

Bagendang, Januari 2019

CAMAT MENTAYA HILIR UTARA



Drs. SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL HARIS, SE**
Jabatan : **Plt.Kasi Tata Pemerintahan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs.SAMSURIJAL, M.Si**
Jabatan : **Camat Mentaya Hilir Utara**
Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagendang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA

Drs.SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Pihak Pertama,
Plt.KASI TATA PEMERINTAHAN

ABDUL HARIS, SE
NIP. 19771119 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI


NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
SOPD
TAHUN

ABDUL HARIS, SE
19771119 201001 1 009
Penata Muda (III/a)
Kasi Tata Pemerintahan
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
2019

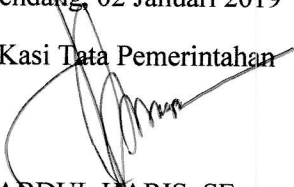
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa /kelurahan	Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100%
		Prosentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	80%
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	85%

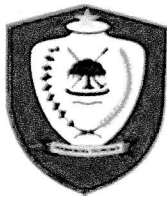
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional/Daerah	Rp 180.260.000	APBD
2.	Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui Pelaksanaan Kegiatan Sampit Expo	Rp 15.000.000	APBD
3.	Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp 4.200.000	APBD
4.	Kegiatan Pembinaan Pengurus Rt/RW se-Kecamatan	Rp6.450.000	APBD

. CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs.SAMSURJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Bagendang, 02 Januari 2019


Plt.Kasi Tata Pemerintahan
ABDUL HARIS, SE
NIP.19771119 201001 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUGIANTO**

Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs.SAMSURIJAL, M.Si**

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Utara


Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagendang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs. SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Pihak Pertama,
KASI PEMBANGUNAN


Drs. SUGIANTO
NIP. 19660216 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI


NAMA : Drs. SUGIANTO
NIP : 19660216 199403 1 006
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I (III/d)
JABATAN : Kasi Pembangunan
SOPD : KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
TAHUN : 2019

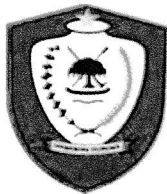
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Prosentase Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang	%	100%

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rp9.600.000	APBD
2.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Melalui Pembangunan Gedung Kantor Baru	Rp991.115.075	APBD

CAMAT MENTAYA HILIR UTARA

Drs. SAMSURIJAL, S.Pd.
NIP. 19630316 199308 1 001

Bagendang, 02 Januari 2019
KASI PEMBANGUNAN

Drs. SUGIANTO
NIP.19660216 199403 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR MUHAMMAD**

Jabatan : Kasi Administrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs.SAMSURIJAL, M.Si**

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Utara


Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagendang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs.SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Pihak Pertama,
KASI ADMINISTRASI


NUR MUHAMMAD
NIP. 19640703 198603 1 022


PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : NUR MUHAMMAD
NIP : 19640703 198603 1 022
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I (III/d)
JABATAN : Kasi Administrasi
SOPD : KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
TAHUN : 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rp 685.367.200	APBD
2.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 44.110.000	APBD
3.	Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 28.545.075	APBD

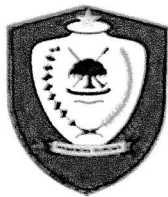
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs. SAMSURIZAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Bagendang, 02 Januari 2019

Kasi Administrasi


NUR MUHAMMAD
NIP.19640703 198603 1022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. SOLEH**

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs.SAMSURIJAL, M.Si**

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Utara

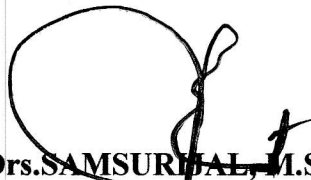
Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagendang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs.SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Pihak Pertama,
**KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**


M.SOLEH
NIP. 19640503 198603 1 021


PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

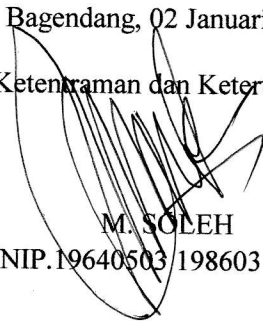
NAMA : M. SOLEH
NIP : 19640503 198603 1 021
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I (III/d)
JABATAN : Kasi Kertentruman dan Ketertiban Umum
SOPD : KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
TAHUN : 2019

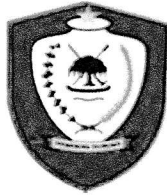
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Ketentruman dan Ketertiban Lingkungan	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	85%
		Jumlah petugas linmas di kecamatan /kelurahan/desa	Jumlah	50 Orang

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp 67.388.000	APBD
2.	Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 8.700.000	APBD

CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs. SAMSURIAL M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Bagendang, 02 Januari 2019
Kasi Ketentruman dan Ketertiban Umum

M. SOLEH
NIP.19640503 198603 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASRUL HAMID, S.IP**

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs.SAMSURIJAL, M.Si**

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Utara


Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

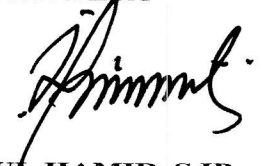
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagendang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs. SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Pihak Pertama,
**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**


HASRUL HAMID, S.IP
NIP. 19840823 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
SOPD
TAHUN


: HASRUL HAMID, S.IP
: 19840823 201001 1 006
Penata (III/c)
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
: KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa/ kelurahan	Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	85%
		Prosentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	80%
		Jumlah PPK desa/kelurahan yang Aktif	Jumlah	7 Desa

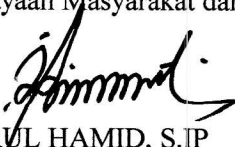
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Rp 5.110.000	APBD
2.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Rp 50.600.000	APBD
3.	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	Rp 44.605.000	APBD
4.	Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional/Daerah	Rp 180.260.000	APBD
5.	Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui Pelaksanaan Kegiatan Sampit Expo	Rp 15.000.000	APBD

Bagendang, 02 Januari 2019

CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs. SAMSURIJAL, M/Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


HASRUL HAMID, S.IP
NIP.19840823 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NEHRU SYAHPUTRA MANGUNDIRAJA, S.Kom**

Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs.SAMSURIJAL, M.Si**

Jabatan : Camat Mentaya Hilir Utara

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagendang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA

Drs.SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Pihak Pertama,
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN

NEHRU SYAHPUTRA MANGUNDIRAJA, S.Kom
NIP. 19921228 201503 1 001

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : NEHRU SYAHPUTRA MANGUNDIRAJA, S.Kom
NIP : 19921228 201503 1 001
PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)
JABATAN : Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
SOPD : KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
TAHUN : 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	56

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Rp 2.240.000	APBD
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 685.367.200,00	APBD

Bagendang, 02 Januari 2019

CAMAT MENTAYA HILIR UTARA

Kasubbag Keuangan dan Perencanaan

Drs. SAMSURIDJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

NEHRU SYAHPUTRA MANGUNDIRAJA, S
NIP.19921228 201503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINI MARYATI, A.Md**
Jabatan : **Plt. Kasubbag Umum dan Pelaporan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : **Drs.SAMSURIJAL, M.Si**
Jabatan : **Camat Mentaya Hilir Utara**
Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagendang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs.SAMSURIJAL, M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Pihak Pertama,
Plt. KASUBBAG UMUM DAN PELAPORAN


RINI MARYATI, A.Md
NIP. 19830315 201101 2 020

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
SOPD
TAHUN


RINI MARYATI, A.Md
19830315 201101 2 020
Pengatur Tk.I (II/d)
Plt.Kasubbag Umum dan Pelaporan
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik


NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 991.115.075	APBD
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 44.110.000	APBD

Bagendang, 02 Januari 2019

CAMAT MENTAYA HILIR UTARA


Drs. SAMSURIZAL M.Si
NIP. 19630316 199308 1 001

Plt.Kasubbag Umum dan Pelaporan


RINI MARYATI, A.Md
NIP.19830315 201101 2 020